



SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 125 TAHUN 2021  
TENTANG  
*QUICK WINS*  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*, perlu menetapkan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Berasal dari Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 dan *Quick Wins Mandatory* sesuai ketentuan pada *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024*.
2. Merupakan urusan utama (*core business*) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan internal dan eksternal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
5. Dilaksanakan untuk diselesaikan di tahun 2021.

KEDUA : *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Seluruh unsur pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar mendukung sepenuhnya pelaksanaan dan pengendalian *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021.

KEEMPAT : Pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2021 dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2021 TENTANG *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2021

MATRIKS *QUICK WINS*  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
TAHUN 2021

Unit Kerja	No.	Program Prioritas	Usulan <i>Quick Win</i>	Output	Waktu Pencapaian Output	Mitra yang Terlibat (K/L Teknis)
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	1.	Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat	Percepatan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat	Output: Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi untuk Pengembangan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan	Triwulan IV 2021	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan

						Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	2.	Reformasi Kerangka Regulasi Pendukung Investasi Strategis: RPP Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Perubahan terhadap PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Reformasi Kerangka Regulasi Pendukung Investasi Strategis: RPP Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Perubahan terhadap PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Output: 1. Penyelesaian RPP Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi 2. PP Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang	Triwulan IV 2021	Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi

				Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah		dan Sumber Daya Mineral, <i>World Bank</i> , Pemerintah Daerah.
Sekretariat Kementerian Koordinator	3.	Penataan Kelembagaan ( <i>Mandatory Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024)	Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan/Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional)	Output: Peralihan Jabatan Struktural (Eselon III dan IV) menjadi Jabatan Fungsional	Triwulan IV 2021	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002